

Islam dan Politik Identitas: Suatu Keharusan atau Pencegahan

Inayatul Mutmainnah^{1*}, Andi Aderus², Jusniati Hasyim³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pepabri Makassar

²Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Da'wah Wal-Irsyad Pasangkayu

*Corresponding author:
inavasosiologi@gmail.com



This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRAK

Politik identitas Islam memiliki fungsi ganda dalam masyarakat majemuk: politik identitas Islam dapat meningkatkan kohesi atau memperparah perpecahan. Studi ini menganalisis dinamika politik identitas Islam di Indonesia, dengan menekankan kapasitasnya untuk mempromosikan cita-cita Islam sambil mengakui efeknya yang memecah belah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, termasuk Gerakan 212, untuk menjelaskan potensi dan tantangan yang dihadirkan oleh politik identitas. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif, percakapan antarbudaya, dan pendidikan sangat penting untuk mengubah politik identitas menjadi katalisator kohesivitas sosial. Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara aspirasi agama dan integrasi nasional, mempromosikan demokrasi dan solidaritas global.

Kata Kunci: *Politik Identitas Islam, Kohesi Sosial, Inklusivitas, Polarisasi, Demokrasi*

ABSTRACT

Islamic identity politics serves a dual function in pluralistic societies: it can either enhance cohesion or intensify division. This study analyzes the dynamics of Islamic identity politics in Indonesia, emphasizing its capacity to promote Islamic ideals while acknowledging its divisive effects. This study employs qualitative approaches and case studies, including the 212 Movement, to elucidate the potential and challenges presented by identity politics. Research indicates that inclusive policies, intercultural conversation, and education are essential for converting identity politics into a catalyst for social cohesiveness. A multidisciplinary approach is essential to achieve equilibrium between religious aspirations and national integration, promoting democracy and global solidarity.

Keywords: *Islamic Identity Politics, Social Cohesion, Inclusivity, Polarization, Democracy*

PENDAHULUAN

Agama sering kali menjadi landasan untuk membela hak-hak komunitas tertentu, politik identitas telah muncul sebagai faktor penting dalam politik dunia. Misalnya, Islam, agama mayoritas di Indonesia, sering kali memainkan peran penting dalam diskusi politik identitas. Gerakan-gerakan yang berakar pada Islam, seperti Aksi Damai 212 pada tahun 2016, menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai kendaraan mobilisasi masyarakat untuk mengekspresikan tujuan-tujuan politik. Menurut perspektif ini, politik identitas Islam sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi modernisasi dan sekularisasi (Ginancar, 2024).

Terdapat peluang lebih besar terjadinya perpecahan dan polarisasi masyarakat ketika Islam digunakan dalam politik identitas. Misalnya, polarisasi yang terjadi pada pemilu 2019 menunjukkan bagaimana agama bisa digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat. Perselisihan serupa juga terjadi di sejumlah negara Muslim lainnya, seperti Mesir dan Pakistan, di mana ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas seringkali diperburuk oleh politik identitas berdasarkan Islam. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengaturan politik identitas Islam secara hati-hati demi menjaga keharmonisan sosial dan kohesi nasional.

Dari sudut pandang sosiologi dan politik, politik identitas dalam konteks Islam telah banyak mendapat perhatian para ulama. Politik identitas, menurut Kymlicka, dapat menjadi senjata yang berguna dalam perjuangan penerimaan agama dan budaya dalam masyarakat majemuk (Kamal & Rozi, 2020). Islam memiliki banyak potensi untuk menjadi landasan bagi politik identitas inklusif dalam lingkungan Islam, asalkan prinsip intinya adalah cita-cita Islam yang universal seperti keadilan dan toleransi. Gerakan berbasis Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sangat penting dalam menciptakan identitas keagamaan yang moderat dalam menghadapi globalisasi. Namun, politik identitas berdasarkan Islam dapat menimbulkan ancaman terhadap demokrasi, terutama jika digunakan untuk tujuan politik.

Pengaruh eksogen seperti globalisasi dan kolonialisme sering kali berdampak pada politik identitas Islam dalam skala dunia. Peristiwa seperti Musim Semi Arab menunjukkan bagaimana politik identitas Islam dapat berfungsi sebagai katalisator konflik dan sarana mobilisasi kerakyatan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara perpecahan sosial dan politik identitas Islam di Indonesia, khususnya setelah pemilu tahun 2019. Meskipun studi-studi ini menawarkan landasan yang kuat untuk memahami dinamika politik identitas Islam, studi-studi tersebut masih terbatas pada isu-isu tingkat makro dan tidak melihat solusi yang bisa diterapkan untuk mengelola politik identitas inklusif secara lokal dan nasional (Rianadiwa et al., 2024).

Gabungan kajian politik identitas Islam dari konteks lokal, nasional, dan global, penelitian ini memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana agama dapat menjadi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial dan sekaligus menjadi alat pemberdayaan. Penelitian ini akan menekankan pada taktik-taktik bermanfaat yang dapat digunakan untuk mengelola politik identitas secara inklusif tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada dampak negatif politik identitas Islam.

Politik identitas Islam telah muncul sebagai fenomena yang menonjol dalam masyarakat kontemporer, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Politik identitas Islam sering dianggap sebagai mekanisme untuk memperkuat kohesi komunitas Muslim sambil melestarikan nilai-nilai agama di tengah modernisasi. Sifatnya yang ganda-sebagai sumber kohesivitas dan potensi konflik-memerlukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami pengaruhnya terhadap masyarakat yang majemuk (Rosidi, 2016)

Sejarah panjang pengaruh Islam di bidang sosial dan politik di Indonesia menggambarkan bagaimana agama ini telah menjadi landasan identitas budaya. Globalisasi telah menimbulkan kekhawatiran baru, termasuk sekularisasi dan tekanan homogenisasi budaya, yang sering dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Dalam situasi ini, politik identitas Islam muncul sebagai sarana untuk melestarikan pentingnya agama dalam kehidupan publik.

Gerakan 212 pada tahun 2016 mencontohkan kapasitas politik identitas Islam untuk menggalang keterlibatan rakyat secara substansial. Gerakan ini menggarisbawahi kapasitas politik identitas Islam untuk meningkatkan kohesi kelompok, sekaligus menunjukkan bahaya polarisasi sosial. Pemilu Indonesia 2019 semakin memperkuat narasi ini dengan menggunakan agama sebagai instrumen politik yang kuat, yang sering kali merusak kohesi sosial (Franklin & Hägerdal, 2024).

Konflik antara kepentingan agama dan norma-norma demokrasi menjadi hambatan utama politik identitas Islam. Politik identitas Islam menawarkan jalan untuk mempromosikan keadilan sosial yang berakar pada prinsip-prinsip Islam; sebaliknya, politik identitas Islam sering kali digunakan sebagai instrumen eksklusivitas yang mengurangi

pluralisme dan kohesi sosial. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan strategi manajemen yang mendamaikan ambisi keagamaan dengan kohesi nasional.

Dampak global terhadap politik identitas Islam tidak dapat dipungkiri. Islamofobia, krisis geopolitik, dan persepsi dunia yang kurang baik terhadap Islam memperburuk kompleksitas politik identitas di negara-negara Muslim. Dalam lingkungan seperti ini, kolaborasi internasional menjadi sangat penting untuk membangun narasi afirmatif mengenai Islam, mengurangi stereotip negatif, dan menumbuhkan solidaritas global.

Dari sudut pandang sosiologis, politik identitas Islam menandakan reaksi terhadap marginalisasi sosial dan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi sering kali memicu gejolak sosial, yang dimanifestasikan melalui politik identitas yang berorientasi pada agama (Azca, 2024). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif sangat penting untuk mengurangi dampak buruk dari politik identitas.

Pendidikan multikultural yang berlandaskan pada keyakinan Islam sangat penting untuk menumbuhkan generasi muda yang lebih inklusif. Pendidikan ini memupuk toleransi dan menumbuhkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya perdamaian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi kaum muda, politik identitas Islam dapat digunakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan keadilan sosial dan mendorong integrasi nasional.

Penelitian ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang politik identitas Islam dengan menggabungkan pandangan sosiologis, politis, dan teologis. Analisis komprehensif tentang gerakan berbasis agama, seperti Gerakan 212, memberikan wawasan yang signifikan untuk menavigasi aspek positif dan negatif dari fenomena ini secara efektif. Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk mengubah politik identitas Islam menjadi kekuatan konstruktif bagi masyarakat kontemporer.

METODE

Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian di Makassar, pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan observasi awal dengan memperhatikan adanya masalah, maka peneliti memilih lokasi tersebut untuk diteliti. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimulai tanggal 20 Agustus – 8 Desember Tahun 2024.

Desain Penelitian

Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini. Pengambilan sampel secara purposive digunakan untuk memilihinforman dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan metode analisis data yang digunakan.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan fokus pada studi kasus. Data diperoleh melalui sintesis wawancara komprehensif, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh terkemuka dalam Gerakan 212, ulama, dan pemuka agama, yang memberikan wawasan komprehensif mengenai motivasi, dinamika, dan dampak politik identitas Islam di Indonesia. Selain itu, analisis dokumen mencakup pemeriksaan arsip berita, pernyataan resmi, dan publikasi yang berkaitan dengan gerakan tersebut, yang bertujuan untuk memahami struktur narasi dan penggambaran yang dibangun oleh entitas politik dan media massa.

Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis untuk mengkaji penggunaan politik identitas Islam sebagai mekanisme mobilisasi dan polarisasi sosial. Analisis ini berusaha untuk melihat pola-pola ucapan dan simbolisme yang mendukung narasi identitas kolektif dan memeriksa dampaknya terhadap hubungan antar kelompok. Metode ini memungkinkan para akademisi untuk menganalisis fungsi bahasa dan simbol dalam memperkuat identitas agama dan politik. Pendekatan multidisiplin menjadi dasar dari penelitian ini, dengan mengintegrasikan studi sosiologi, politik, dan agama untuk menawarkan perspektif yang komprehensif.

Keabsahan data dijamin oleh triangulasi metodologi dan sumber. Para peneliti menganalisis hasil dari beberapa metode pengumpulan data untuk mengurangi bias interpretasi. Validitas internal ditingkatkan dengan verifikasi dari informan kunci, sementara ketergantungan data dijamin melalui dokumentasi yang komprehensif dari prosedur penelitian. Metode ini menjamin kualitas data dan meningkatkan kemampuan generalisasi temuan untuk kejadian serupa dalam konteks lokal dan global. Model metodologis ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang politik identitas Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terlepas dari kesulitan yang ditimbulkan oleh modernisasi dan globalisasi, politik identitas Islam, di satu sisi, dapat mendorong penguatan nilai-nilai agama dan meningkatkan pengakuan terhadap komunitas Muslim (Kochi, 2021). Inisiatif berbasis Islam, seperti Aksi 212 di Indonesia, menunjukkan bagaimana politik identitas dapat digunakan sebagai senjata dalam perjuangan menegakkan prinsip-prinsip Islam dan melindungi kepentingan Muslim (Alkatiri, 2023). Dalam hal ini, politik identitas Islam dipandang penting untuk menjaga identitas agama dalam menghadapi kesulitan budaya dan perubahan masyarakat.

Politik identitas berbasis Islam dapat menimbulkan konflik dan polarisasi. Polarisasi ini terlihat jelas di tingkat nasional, seperti yang ditunjukkan pada pemilu Indonesia tahun 2019, ketika blok-blok politik semakin terpecah karena penggunaan agama. Hal ini menempatkan integrasi nasional dalam bahaya dan memicu meningkatnya antagonisme antarkelompok (Wahuningratna et al., 2024). Penggunaan politik identitas berbasis Islam dalam konteks negara-bangsa berpotensi memperburuk kondisi demokrasi dan memicu ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam skala global, seperti yang terjadi di Mesir dan Turki.

Dua perspektif utama mengenai politik identitas Islam dikaji dalam studi ini: sebagai upaya preventif dan sebagai kebutuhan. Perjuangan kelompok minoritas Muslim untuk mendapatkan penerimaan dan perlindungan hak-haknya dalam masyarakat majemuk memunculkan politik identitas Islam sebagai sebuah keniscayaan. Dalam hal ini, Islam berfungsi untuk memperkuat kebersamaan umat Islam dan membentuk identitas yang kokoh dalam menghadapi bahaya globalisasi (Yuwanamu, 2016). Politik identitas berbasis Islam dapat mendorong kebijakan inklusif dan meningkatkan pengetahuan Islam, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus gerakan Aksi 212 di Indonesia.

Tanpa penanganan yang baik, politik identitas berdasarkan Islam juga dapat menghambat integrasi sosial, menurut penelitian ini. Misalnya, politik identitas berbasis agama memperburuk identitas dasar yang bersifat restriktif, memicu ketegangan antar kelompok, dan menciptakan polarisasi ekstrem dalam konteks pemilu Indonesia tahun 2019. Di negara-negara Muslim seperti Mesir dan Turki, dimana politik identitas berbasis Islam digunakan untuk meminggirkan kelompok minoritas dan melemahkan demokrasi, perselisihan identitas serupa juga terjadi.

Diperlukan pengelolaan politik identitas Islam yang inklusif dan berbasis dialog antarkelompok. Misalnya, pemerintah dan organisasi keagamaan di Indonesia harus mendukung tindakan yang mendorong pemahaman dan toleransi antar umat beragama, sekaligus menurunkan politik identitas yang eksklusif dan polarisasi. Oleh karena itu, politik identitas Islam dapat dihindari untuk mencegah konflik dan polarisasi sosial, selain menjadi alat penting untuk menjaga identitas keagamaan. politik identitas adalah cerminan kompleksitas bangsa. Di dalamnya, peran pemerintah diuji untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan keberagaman, dengan semangat menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

Politik identitas Islam memiliki potensi yang cukup besar untuk menumbuhkan identitas kolektif yang kuat dalam masyarakat yang majemuk. Gerakan keagamaan, seperti yang ditunjukkan oleh Gerakan 212, menggambarkan makapasitas elemen-elemen agama untuk menumbuhkan solidaritas dan memperkuat cita-cita Islam. Namun demikian, di balik harapan ini, terdapat tantangan yang signifikan: adanya narasi eksklusif yang sering kali memecah belah masyarakat dan bukannya memupuk persatuan. Politik identitas berbasis agama menimbulkan perpecahan yang secara signifikan membahayakan kerukunan sosial,

terutama di lembaga-lembaga demokratis (Hasan et al., 2024).



Gambar 3.1 (Peran Pemerintah dalam Menangani Politik Identitas)

Pengaruh memecah belah dari politik identitas Islam di dalam kerangka demokrasi semakin jelas terlihat. Pemilu 2019 di Indonesia menjadi contoh penggunaan agama sebagai instrumen yang memecah belah, yang berdampak pada dinamika antarkelompok. Polarisasi ini tidak hanya menimbulkan keretakan intelektual tetapi juga memperburuk konflik sosial. Lebih jauh lagi, media sosial secara signifikan meningkatkan dampak-dampak ini. Algoritma media sosial sering kali membentuk ruang gema yang memperkuat bias kelompok dan mengintensifkan kekurangan wacana lintas identitas (Rumahuru, 2018).

Tantangan hubungan mayoritas-minoritas secara signifikan berdampak pada politik identitas Islam. Di negara-negara yang didominasi oleh Muslim, seperti Indonesia, politik identitas sering kali mengintensifkan kesenjangan antara mayoritas dan minoritas. Ketegangan semacam itu membutuhkan pendekatan yang terukur untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas sambil mempertahankan cita-cita yang dianut oleh kelompok mayoritas.

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengurangi dampak buruk dari politik identitas. Sebuah kurikulum yang menggabungkan pendidikan multikultural yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang toleransi dan inklusi sosial. Pendidikan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan wacana konstruktif di antara kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat cita-cita Islam dan alat untuk membina kohesi sosial (Amin & Ritonga, 2023).

Fenomena politik identitas Islam sering dikaitkan dengan reaksi terhadap isu-isu eksternal, seperti Islamofobia, dalam skala dunia. Hal ini menggarisbawahi perlunya strategi transnasional untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan identitas agama (Hendri et al., 2024). Kerja sama global dalam mempromosikan narasi afirmatif tentang Islam dapat membantu mengurangi pengakuan ketegangan yang timbul dari politik identitas. Strategi semacam itu dapat membantu meningkatkan solidaritas di seluruh dunia di antara umat Islam.

Meskipun politik identitas Islam dapat meningkatkan keterlibatan politik, namun penerapannya yang keliru dapat membahayakan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi membutuhkan ruang publik yang inklusif; namun, politik identitas yang membatasi sering kali membatasi ruang tersebut (Ichsan Azis et al., 2023). Oleh karena itu, strategi yang mendorong interaksi antarkelompok dan mengurangi eksklusivitas politik identitas berbasis agama menjadi sangat penting.

Para pemimpin Islam memiliki kewajiban penting untuk menjamin bahwa politik identitas Islam tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar agama, termasuk perdamaian dan keadilan. Strategi yang adil dan moderat harus diadopsi untuk mengurangi bahaya polarisasi. Selain itu, entitas keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat menjadi katalisator penting dalam mempromosikan politik identitas yang lebih konstruktif.

Sejarah kolonialisme yang panjang memberikan konteks yang signifikan untuk memahami politik identitas Islam. Pada masa penjajahan, agama sering kali berfungsi sebagai alat pembangkangan terhadap penindasan dari luar. Dalam konteks kontemporer, politik identitas Islam harus melampaui narasi perlawanan dan secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang inklusif (Jong, 2024).

Kaum muda Muslim secara signifikan mempengaruhi evolusi politik identitas Islam. Generasi muda, yang memiliki pandangan yang lebih mudah beradaptasi terhadap keragaman identitas, memiliki kapasitas untuk mendorong politik identitas yang lebih inklusif. Pendidikan dan pemahaman multikultural di kalangan kaum muda Muslim sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Pendekatan multidisiplin sangat penting untuk memahami seluk-beluk politik identitas Islam. Penelitian yang menggabungkan sosiologi, politik, psikologi, dan teologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang masalah ini. Selain itu, studi kasus seperti Gerakan 212 memberikan wawasan yang signifikan tentang fungsi politik identitas Islam dalam kerangka kerja lokal.

Pemerintah secara strategis mengelola politik identitas Islam selama pelaksanaan kebijakan untuk menjaga perdamaian sosial. Prioritas harus diberikan pada kebijakan inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat. Pemerintah dapat memfasilitasi inisiatif percakapan antar agama dan antar budaya yang bertujuan untuk mengurangi prasangka dan mendorong pemahaman lintas identitas. Strategi ini sangat penting untuk mencegah marginalisasi kelompok-kelompok tertentu yang dapat memicu perselisihan sosial (Fukuyama, 2019).

Selain itu, meningkatkan ketahanan sosial merupakan langkah penting dalam mengurangi dampak buruk dari politik identitas Islam. Ketahanan sosial dapat dicapai melalui kolaborasi di antara kelompok-kelompok dengan identitas yang beragam, baik melalui inisiatif sosial, keterlibatan masyarakat, maupun wacana antarkelompok. Dengan memupuk hubungan antar komunitas, potensi konflik dapat dikurangi, sementara rasa saling percaya dan solidaritas dapat ditingkatkan (Osewe & Musa, 2018).

Implikasi ekonomi dari politik identitas Islam juga patut dipertimbangkan. Ketidakadilan ekonomi sering kali memperparah perselisihan sosial yang dipicu oleh politik identitas. Pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan merata untuk mencegah memburuknya ketegangan yang berasal dari politik identitas karena ketidakpuasan ekonomi. Pengembangan ekonomi berbasis komunitas dalam masyarakat Muslim dapat membantu mengurangi kesulitan yang mungkin terjadi.

Studi kasus, termasuk Gerakan 212, menunjukkan bagaimana politik identitas Islam dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan keadilan sosial dan moral. Namun demikian, gerakan-gerakan ini menunjukkan bagaimana politik identitas dapat dengan mudah dieksploitasi untuk tujuan-tujuan yang bersifat eksklusif dan partisan. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan wawasan penting untuk mencapai keseimbangan antara ambisi agama dan kohesi nasional.

Konflik antara kepentingan nasional dan tujuan agama sering muncul sebagai isu sentral dalam politik identitas Islam. Dalam beberapa kasus, politik identitas berbasis agama dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip nasionalis yang mengutamakan persatuan dalam keragaman (Zhou, 2022). Oleh karena itu, strategi yang dapat menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut tanpa mengorbankan salah satu di antaranya menjadi sangat penting.

Kritik terhadap metodologi yang terbatas dalam politik identitas Islam semakin relevan dalam masyarakat kontemporer, global, dan majemuk. Strategi yang secara eksklusif berfokus pada perbedaan identitas sering kali memperparah perpecahan di antara kelompok-kelompok sosial. Sebaliknya, politik identitas Islam yang didasarkan pada inklusivitas dan wacana dapat berfungsi sebagai faktor konstruktif untuk mempromosikan kohesi sosial.

Kelangsungan hidup politik identitas Islam bergantung pada kapasitasnya untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan sosial yang terus berkembang. Jika dikelola dengan bijaksana, politik identitas Islam dapat berfungsi sebagai instrumen yang ampuh untuk mendorong pembangunan sosial, meningkatkan keterlibatan politik, dan memperkuat kohesi masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan ini hanya dapat terwujud jika politik identitas dijalankan sesuai dengan cita-cita keadilan dan toleransi.

Pentingnya media dalam politik identitas Islam tidak dapat dipungkiri. Media sering kali berfungsi sebagai media untuk mengukuhkan identitas kelompok, meskipun media juga dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk mendorong komunikasi dan pemahaman di antara berbagai kelompok. Konten media yang adil dan inklusif dapat meredakan ketegangan yang mungkin timbul dari politik identitas Islam (Pendidikan dan Studi Islam et al., 2024).

Politik identitas Islam terkait erat dengan masalah geopolitik dalam skala global. Faktor-faktor seperti Islamofobia, terorisme, dan krisis global sering kali membentuk persepsi internasional tentang politik identitas Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus terlibat dengan entitas internasional lainnya untuk melawan persepsi buruk yang sering dikaitkan dengan Islam.

Pada akhirnya, politik identitas Islam memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi katalisator revolusi masyarakat jika diterapkan secara efektif. Politik identitas Islam, yang didasarkan pada cita-cita keadilan, inklusivitas, dan dialog, dapat mendorong persatuan nasional, meningkatkan solidaritas, dan memperjuangkan keadilan sosial. Upaya ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, otoritas agama, masyarakat sipil, dan komunitas Muslim untuk membangun politik identitas yang mendukung nilai-nilai Islam dan menghormati keragaman (Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2024).

KESIMPULAN

Politik identitas Islam, meskipun merupakan sarana untuk menegaskan keyakinan dan hak-hak Muslim, menimbulkan hambatan yang cukup besar, terutama dalam konteks demokrasi. Studi ini menekankan karakteristik ganda: sebagai kekuatan kohesif dan katalisator perpecahan. Studi ini menggarisbawahi perlunya strategi dialogis yang inklusif untuk mengurangi dampak polarisasi dan mendorong kohesi sosial. Politik identitas Islam dapat meningkatkan integrasi nasional dan solidaritas global dengan mengintegrasikan konsep-konsep keadilan, toleransi, dan inklusivitas. Tata kelola pemerintahan yang efisien dan kebijakan yang adil sangat penting untuk menjamin pengaruhnya yang menguntungkan bagi demokrasi dan persatuan sosial. Pemerintah harus mempromosikan wacana agama dan antarbudaya melalui kebijakan inklusif yang menjunjung tinggi hak-hak minoritas dan mengurangi perselisihan yang timbul dari eksklusivitas identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Z. (2023). Defend Islam rally action 212 and their reunion: The failure of forming a New ritual. *Cogent Arts and Humanities*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2286069>
- Amin, M., & Ritonga, A. D. (2023). Populist student organizations in Indonesia: an analysis of anti-establishment ideas. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01697-9>
- Azca, M. N. (2024). A “Maverick Salafi Political Jihadist” in a Turbulent Period: A Biographical Study of Dr Fauzi. *Politics and Governance*, 12. <https://doi.org/10.17645/pag.7984>
- Franklin, N., & Hägerdal, H. (2024). Indonesian Heroes and Villains: National Identity, Politics, Law, and Security. In *Politics and Governance* (Vol. 12). Cogitatio Press. <https://doi.org/10.17645/pag.8383>
- Fukuyama, Francis. (2019). *Identity: contemporary identity politics and the struggle for recognition*. Profile Books.
- Ginanjari, H. (2024). *Dinamika Politik Identitas di Indonesia: Permasalahan, Peluang, dan Jalan ke Depan* (Vol. 2, Issue 1).
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., & Guntur, M. (2024). Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Nanang Fahrozi Bandarsyah Universitas Bandar Lampung. *Politik Dan Sosial Indonesia*, 2, 57–69. <https://doi.org/10.62951/aktivisme.v1i2.196>
- Hendri, N., Qudsy, S., Elvira, M., & Ismail. (2024). Resistance of Islamist Groups to Government Policies in the Settlement of Religious Radicalism. *International Journal of Islamic Thought*, 25, 109–121. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.290>
- Ichsan Azis, M. N., Amir, M., Subair, M., Syamsurijal, S., Asis, A., & Syuhudi, M. I. (2023). Religion and identity polarisation: A slight notfrom the frontier region. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8519>
- Jong, A. (2024). Social Theory and Navigating Indeterminacy: A Configurational Analysis of Iranian Youth’s Identity Construction in Contemporary Iran. *Societies*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/soc14030032>
- Kamal, M., & Rozi, S. (2020). THE CULTURED ISLAM: THE BOUNDARY OF ISLAMIC

- IDENTITY BETWEEN THE MINANGKABAU AND MANDAILING ETHNICS. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 22(2), 223–243. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.9021>
- Kochi, T. (2021). *A Dangerous Text Francis Fukuyama's Mischaracterisation of Identity, Recognition and Right-Wing Nationalism*. 20(2), 2021. <https://doi.org/10.21307/borderlands-2021-016>
- Nusantara: *Jurnal Pendidikan Indonesia*. (2024). <https://doi.org/10.14421/njpi.2024.v4i2-12>
- Osewe, A. E., & Musa, G. M. (2018). *Maguzawa and Nigerian Citizenship: Reflecting on Identity Politics and the National Question*.
- Pendidikan dan Studi Islam, J., Mu, F., Sa, S., Al Ayubi, S., Ahmad Ghufon Risalah, I., & Ahmad Ghufon, I. (2024). 442 *Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik) Politik Identitas Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. 10(1). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.647
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Salam, V. T., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.26593/jsh.v4i01.7548>
- Rosidi, I. (n.d.). *Da'wah and Politics Among Muslim Preachers in Contemporary Indonesia*.
- Rumahuru, Y. Z. (2018). Kontekstualisasi dalam Penyebaran Islam: Analisis Pola Pembentukan Islam di Nusantara. *International Journal of Islamic Thought*, 14(1), 123–129. <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.011>
- Wahuningratna, R. N., Wasisto, M. A., & Zempi, C. N. (2024). SOSIALISASI LITERASI POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA TERHADAP INDIKASI BLACK CAMPAIGN BERBASIS POLITIK IDENTITAS MELALUI SOSIAL MEDIA. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(2), 311–325. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v5i2.2359>
- Yuwanamu, I. (2016). BENTUK ISLAM FAKTUAL: KARAKTER DAN TIPOLOGI ISLAM INDONESIA. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 18(2), 199. <https://doi.org/10.18860/el.v18i2.3684>
- Zhou, S. (2022). The origins, characteristics and trends of neo-nationalism in the 21st century. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 6(1). <https://doi.org/10.1186/s41257-022-00079-4>